

RINGKASAN

Pemidanaan notaris dalam tindak pidana korupsi sebagai akibat dikeluarkannya *covernote* pada Putusan Nomor 4242K/Pid.Sus/2023

Penerbitan *covernote* oleh notaris umumnya berisi suatu pernyataan. Alasan notaris dalam mengeluarkan *covernote* biasanya atas dasar permintaan penghadap serta dapat juga atas dasar permintaan dari Bank sebagai dasar agar fasilitas kredit dapat dicairkan oleh Bank. Pembuatan *covernote* oleh notaris untuk melancarkan kegiatan pemberian atau pencairan fasilitas kredit oleh perbankan seharusnya tidak menjadi suatu permasalahan hukum. Salah satu permasalahan hukum atas pembuatan *covernote* terdapat pada Putusan Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023 yang menyatakan notaris DF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan *covernote* sebagai dasar penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi. Serta untuk menganalisis pemidanaan notaris terhadap penerbitan *covernote* dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *covernote* yang dibuat oleh notaris dengan tidak berhati-hati dan mengandung adanya kesalahan sehingga berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHP sebagai perbuatan pembantuan dengan menerbitkan *covernote* yang dapat dikualifikasikan sebagai alat bantu dalam tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan perbankan yang sudah mencairkan fasilitas kredit atas dasar adanya *covernote* menjadikan bank sebagai kreditur separtis sehingga memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan saat terjadi wanprestasi. Pemidanaan notaris terhadap pembuatan *covernote* dalam tindak pidana korupsi pada putusan Mahkamah Agung Nomor 4242K/Pid.Sus/2023 belum tepat karena tidak memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan hakim menjatuhkan pidana dengan disparitas antara pelaku dan pembantu tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak lagi mengenal disparitas pemidanaan sehingga pidana terhadap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

SUMMARY

The Criminal Liability of a Notary in a Corruption Offense as a Consequence of Issuing a Covernote in Supreme Court Decision Number 4242K/Pid.Sus/2023

The issuance of a covernote by a notary generally contains a statement. The notary's reason for issuing a covernote is typically based on the request of the appearing party, and may also be based on a request from a bank, serving as the basis for the disbursement of a credit facility by the bank. The issuance of a covernote by a notary to facilitate the granting or disbursement of credit facilities by the banking sector should not, in principle, constitute a legal problem. However, a legal issue regarding the issuance of a covernote arose in Supreme Court Decision Number 4242K/Pid.Sus/2023, which declared that Notary DF was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of aiding and abetting a corruption offense.

This research aims to analyze the legal standing of a covernote as a basis for imposing criminal penalties in a corruption offense, and to examine the criminal liability of a notary in the issuance of a covernote that is linked to a corruption crime. The study adopts a normative juridical approach with a prescriptive research specification. It relies on secondary data and uses qualitative analysis methods.

The results of the study indicate that the position of the covernote made by the notary was careless and contained errors so that based on Article 56 paragraph (1) of the Criminal Code as an act of assistance by issuing a covernote that can be qualified as an aid in a criminal act of corruption. This is because the bank that has disbursed the credit facility based on the existence of a covernote makes the bank a separate creditor so that it has the right to execute the collateral object when a default occurs. The criminalization of notaries for making covernotes in criminal acts of corruption in the Supreme Court decision Number 4242K / Pid.Sus / 2023 is not appropriate because it does not provide legal certainty. This is because the judge imposed a sentence with a disparity between the perpetrator and the accomplice in the criminal act of corruption. Based on the provisions of Article 15 of the Corruption Crime Law no longer recognizes disparity in punishment so that the punishment for people who attempt, assist, or conspire in criminal acts of corruption is the same as the perpetrator of the criminal act of corruption.